KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan berkat-Nya jualah kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Riview Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018.

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan,terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Riview Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 ini merupakan acuan umum tentang arah pembangunan industry dan perdagangan ke depan. Arahan ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program industry dan perdagangan menjadi lebih konkrit. Renstra yang telah disusun ini tak akan banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Dengan perkataan lain, diperlukan komitmen, motivasi, dan kegigihan untuk keberhasilan pembangunan industry dan perdagangan. Komitmen, motivasi, dan kegigihan bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam profesi yang sarat dengan tantangan ini. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 ini disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari para pejabat eselon III, IV dan staf dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Dengan Renstra, arah dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan lebih mudah dievaluasi. Dan diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dapat menjadi institusi yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mampu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan Riview Renstra ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dengan demikian kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penyusunan dimasa mendatang.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Riview Renstra ini kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur pemerintah dapat menjadi manfaat bagi masyarakat secara luas.

Demikianlah semoga Riview Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2015

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU

MHD. FIRDAUS, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610823 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistimatika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya SKPD.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	16
BAB III ISU – ISU STRATEGIS	
3.1. Indentifikasi Permasalahan.....	18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	22
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	25
3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau	35
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi.....	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	41
4.3. Strategi Kebijakan.....	44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.. 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA (SKPD) MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... 55

BAB VII PENUTUP..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi telah melahirkan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Wujud nyata dari desentraliasi adalah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan suatu rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Pemberlakuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat bagi masing-masing daerah untuk mewujudkan itu dengan menyusun rencana pembangunannya baik itu jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sejalan dengan itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai eksekusi dari perencanaan pembangunan daerah, perlu membuat sebuah rencana strategis yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan menengah daerah. Rencana Startegis SKPD adalah sebagai kontrak politik SKPD dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam lingkup teknis SKPD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sebagai salah satu SKPD dibawah Pemerintah Provinsi Riau adalah instansi teknis yang membina sektor ekonomi di daerah yaitu Sektor Industri dan Perdagangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Riau.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dalam dasar pelaksanaan kegiatan Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantu dibidang industri dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran target-target RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN &RPJMN serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Terkait di pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review terhadap dokumen Renstra-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra – SKPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Riau.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Sejalan dengan adanya era reformasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang khususnya pemerintahan telah melahirkan beberapa ketentuan maupun peraturan dalam menjalankan roda pembangunan. Untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau tahun

2014-2019 mengacu kepada ketentuan dimaksud antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;

1.3. Maksud dan Tujuan

Review Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Mempertajam arah dan strategi pembangunan dibidang Industri dan Perdagangan yang akan menjadi dasar pimpinan dan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Mensinkronkan program pembangunan dan Indikator di Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD Provinsi Riau dan penyesuaian kegiatan tahunan dengan program pembangunan.
3. Sebagai Dasar bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Riview Renstra ini adalah :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dengan

kegiatan tahunan berdasarkan program yang dapat dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;

2. Mempermudah upayah untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 -2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019, didalamnya Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tahun 2014 – 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi.

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L, RPJMD Provinsi Riau yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaiannya.

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4. Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menjelaskan isu strategis berdasarkan tahun rencana.

BAB IV. VISI,MISI,TUJUAN & SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun.

4.3. Strategi dan Kebijakan.

Menjelaskan Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan

5.2. Indikator Kinerja.

Menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari indicator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.

.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2014 - 2019 sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Riau , yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2015.

Didalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tupoksi bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok tugas melaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Industri dan Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk menjalan tugas pokok tersebut maka Dinas Perindustrian dan perdagangan berfungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan koordinasi pengembangan Industri;
3. Pembinaan dan koordinasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan luar negeri;
4. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;

5. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas membawahi :
   a. Sub Bagian Bina Program
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
   c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen membawahi :
   a. Seksi Pengawasan Kemetrologian
   b. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
   c. Seksi Pembinaan Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen
4. Bidang Industri Kecil dan Menengah membawahi :
   a. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
   b. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan;
   c. Seksi Industri Logam dan teknologi;
5. Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi membawahi :
   a. Seksi Industri Agro dan Kimia.
   b. Seksi Basis Iindustri Manufaktur
   c. Seksi Pengembangan Kawasan Teknologi
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi :
   a. Seksi Pemantauan dan pengawasan distribusi
   b. Seksi Pengembangan Pasar Produk Daerah
   c. Seksi Fasilitas Perdagangan Dalam Negeri
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi :
   a. Seksi Eksport;
   b. Seksi Import;
   c. Seksi Fasilitasi dan kerjasama Perdagangan Luar Negeri;

8. UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Perdagangan membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Seksi Pelatihan;
   c. Seksi Kerjasama dan Pengembangan.
9. UPT Metrologi membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Seksi Bimbingan Mutu;
   c. Seksi Pelayanan Teknis.
10. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang membawahi :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Seksi Mutu;
   c. Seksi Teknis Laboratorium.

Berikut ini adalah selengkapnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau :

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

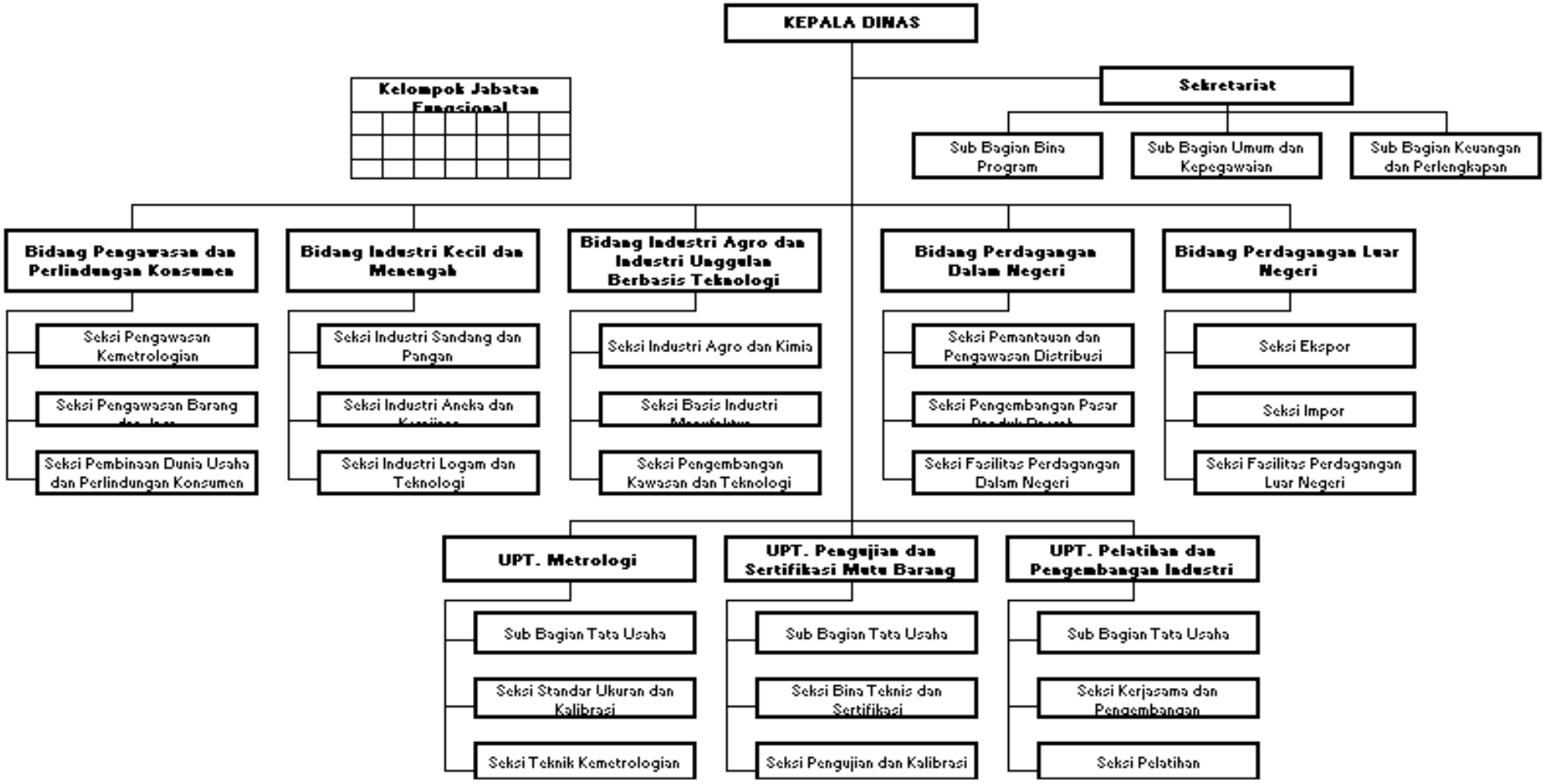

2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang industri dan perdagangan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada saat ini memiliki kekuatan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai per 31 Maret 2014 menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	16	6	22
2.	Sarjana	51	37	88
3.	Sarjana Muda	5	12	17
4.	SLTA	48	-	48
5.	SLTP	6	30	36
6.	SD/SR	6	3	9
	Jumlah	**132**	**88**	**220**

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Gol. Ruang per 31 Maret 2014

No.	Gol. Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	24	
2.	II	144	
3.	III	44	
4.	IV	8	
	JUMLAH	**220**	

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Gol. Ruang per 31 Maret 2014

No.	Pangkat / Gol.Ruang	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	IV/d	-	-	-
2.	IV/c	2	3	5
3.	IV/b	8	1	9
4.	IV/a	8	2	10
		18	**6**	**24**
1.	III/d	27	29	46
2.	III/c	10	5	15
3.	III/b	27	18	45
4.	III/a	17	11	28
		81	**63**	**144**
1.	II/d	-	1	1
2.	II/c	6	3	9
3.	II/b	10	7	17
4.	II/a	12	5	17
		28	**16**	**44**
1.	I/d	2	-	2
2.	I/c	2	1	3
3.	I/b	1	1	2
4.	I/a	1	-	1
	JUMLAH	**6**	**2**	**8**
JUMLAH PEGAWAI (PNS + CPNS)				**220**

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Struktural /Penjenjangan per 31 Maret 2014

No.	Diklat	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	-	
2.	Diklatpim Tk.II	-	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	ADUMLA	16	
5.	Diklatpim Tk.IV.	37	
	Jumlah	**59**	

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Fungsional /Penjenjangan per 31 Maret 2014

No.	Jenis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Staf	151	
2.	Panera	13	
3.	Penguji Mutu Barang	12	

4.	Penyuluh	11	
5.	Widyaiswara	3	
	Jumlah	**190**	

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut Urusan per 31 Maret 2014

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Industri	39	
2.	Perdagangan	107	
	Jumlah	**146**	

Tabel 2.7. Jumlah Rasio Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Jumlah Pegawai Propinsi per 31 Maret 2014

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan	220	
2.	Pegawai Propinsi Riau	7.786	
	Jumlah	**28.3%**	

Selain dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. sampai dengan Tahun 2013 berikut ini adalah

Tabel 2.8. Rekapitulasi Aset Tetap yang tercatat sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah	53.500.177.000	
2.	Peralatan dan Mesin	19.844.536.697	
3.	Gedung dan Bangunan	16.576.235.057	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	617.572.153	
5.	Aset Tetap lainnya	146.975.000	
	Jumlah	**90.685.495.908**	

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Industri dan Perdagangan di masa lalu (2009 - 2013) dapat dilihat pada tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Rencana Kinerja Utama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau berikut ini dimana telah menunjukan beberapa keberhasilan yang dicapai, walaupun ada beberapa indikator yang belum cukup memuaskan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari hasil analisis Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, RTRW dan KLHS, yang berimplikasi sebagai bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Peradagangan Provinsi Riau maka diidentikasikan sebagai tantangan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung aktivitas industri.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penggunaan produk dalam negeri,
3. Belum terjaminnya kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan.
4. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya sehingga membanjirnya produk impor/tidak berlabel.
5. Daya saing produk industri untuk nasional ataupun internasional masih rendah.
6. Masih rendahnya inovasi dan penguasaan teknologi oleh Industri Kecil dan menengah
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen.

Sementara itu, selain sebagai tantangan era perdagangan bebas dapat juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan :

1. Jumlah penduduk Provinsi Riau yang banyak.
2. Keberagaman potensi industri dan perdagangan di Riau.

3. Adanya akses transportasi nasional dan internasional langsung ke Pekanbaru.
4. Adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang tinggi dari sektor industri pengolahan dan perdagangan.
5. Pelaksanaan pasar ASEAN Tahun 2015 dan pasar global lainnya serta adanya peluang pasar non tradisional.

BAB III
ISU - ISU STRTEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Perkembangan Industri di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah Perusahaan yang bergerak di sektor Industri pengolahan. Perusahaan yang bergerak di sektor industri yang terdapat di Provinsi Riau tahun 2011 sebanyak 2015 perusahaan mengalami peningkatan sebesar 22 perusahaan dari tahun 2010, (Tabel 3.2). Keadaan ini menunjukkan bahwa iklim berinvestasi di Provinsi Riau cukup kondusif dan berkembang serta memberikan prospek yang bagus bagi masyarakat Provinsi Riau. Kondisi yang demikian didukung oleh kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan perizinan dengan baik serta bantuan perbankan yang memberikan pinjaman atau kredit.

Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut Klasifikasi Industri
Tahun 2008 – 2011Provinsi Riau

Kode KBLI 2009	Klasifikasi Industri (Unit)	Jumlah Perusahaan (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)
10	Industri Makanan	152	49,665
11/12/13/ 30/32/33	Industri minuman/Industri pengolahan tembakau/Industri tekstil/ Industri alat angkut lainnya/ Industri pengolahan lainnya/ Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	8	911
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	6	2,722
17	Industri kertas, barang dari kertas	5	15,752
18	Industri percetakan dan reproduksi media rekam	6	184
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	3	514
22	Industri karet, barang dari karet dan plastik	15	2,287
23	Industri barang galian bukan logam	4	160
31	Industri Furnitur	6	780
	Jumlah 2011	205	72,903
	2010	183	51,015
	2009	191	48,202
	2008	191	53,307

Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2013)

Peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri ini tentunya memberikan dampak bagi terbukanya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang dapat diserap berjumlah 51.015 orang yang selanjutnya meningkat menjadi 72,903 orang pada tahun 2012. Ini berarti terjadi penambahan lapangan pekerjaan selama satu tahun sebanyak 21.888 orang.

Sementara itu dilihat dari klasifikasi industri, industry yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (Kode 10 KBLI 2009) yaitu sebanyak 152 perusahaan diikuti kelompok industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik (Kode 22 KBLI 2009) sebanyak 15 perusahan, klasifikasi industri yang terkecil terdapat di Provinsi Riau adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (Kode KBLI 20).

Perkembangan sektor Industri di Provinsi Riau seperti yang diuraikan di atas cukup mengembirakan. Namun demikian pada sisi yang lain masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan dalam pengembangan sektor industri adalah :

(1) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah;
(2) Ketersediaan bahan baku produk yang relatif terbatas;
(3) Inovasi dan daya saing produk masih rendah;
(4) Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor;
(5) SDM serta kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah;
(6) Penguasaan teknologi masih rendah;
(7) Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
(8) Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal. (9) Jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri besar.

Selanjutnya sektor Sektor Perdagangan Provinsi Riau sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dinas Perinsutrian dan Perdagangan juga mengalami

peningkatan yang cukup baik. Selama 5 tahun terakhir kontribusi sektor ini terhadap PDRB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 kontribusi perdagangan terhadap PDRB sebesar 7,96 % meningkat menjadi 10,48 % tahun 2012 (gambar 3.2). Peningkatan PDRB sektor perdagangan menyebabkan peningkatan produksi global, peningkatan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menambah sumber devisa untuk pembangunan ekonomi.

Gambar 3.2. Proporsi Ekspor Riau Menurut Sektor

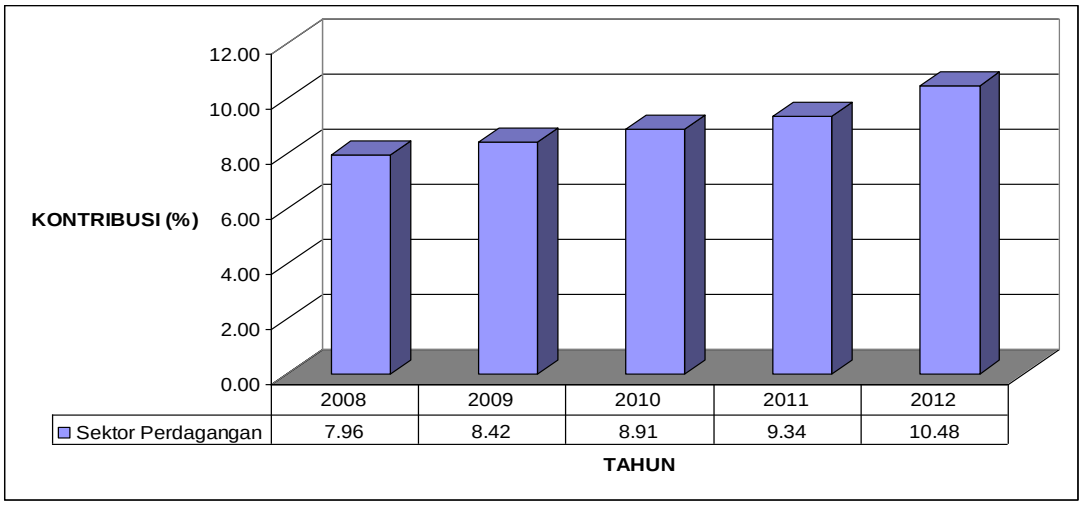

Gambar 3.2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2009 – 2012 Provinsi Riau

Nilai ekspor non migas pada tahun 2012 gambar 3.3 sebesar 66 persen lebih besar dari ekspor migas yaitu 34 persen. Ekspor non migas didominasi oleh hasil industri dengan volume ekspor sebesar 15.864.138 kg dan nilai ekspor sebesar US $12.425.444.

Gambar 3.3. Proporsi Ekspor Riau Menurut Sektor

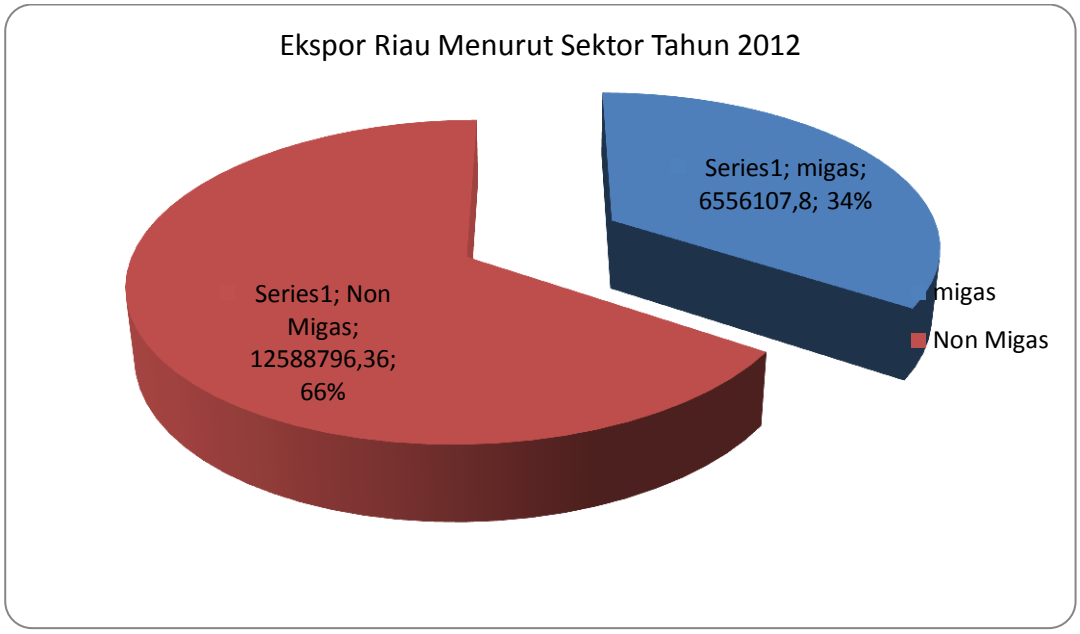

Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2013)

Nilai ekspor migas, relatif tinggi 10 kali lipat dibanding impor namun migas ini adalah *non-renewable resources* yang tidak *sustainable* dalam jangka panjang. Pendapatan daerah dari dana bagi hasil migas yang tidak berkesinambungan ini selayaknya ditopang dengan ekspor non-migas. Sehingga perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan ekspor dari sektor non migas.

Sebagaimana halnya sektor industri, sektor perdagangan juga menghadapi masalah dalam pengembangan. Adapun permasalahan yang dihadapi pengembangan sektor perdagangan :

(1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor;
(2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
(3) Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
(4) Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
(5) Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;
(6) kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan janji-politik yang disampaikan pada saat menjadi calon. Tentunya ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur janji-janji tersebut wajib diwujudkan dengan program-program pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih untuk Tahun 2014-2019, telah merumuskan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu:

"Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang Baik, Profesional (good governance dan clean governent) dan Handal
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan penataanlingkungan, kebersihan dan pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Berkenaan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Misi Keempat Mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu program-program strategis sebagai pelaksanaan Visi dan Misi diatas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

A. Sektor Industri

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Penataan struktur Industri.
3. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
4. Program Pengembangan Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

B. Sektor Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
2. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Sehubungan denga hal tersebut diatas, faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau terhadap pencapaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

NO	VISI PROVINSI RIAU : TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TINGGI, TERHAPUSNYA KEMISKINAN SERTA TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA			
	MISI DAN PROGRAM	**PERMASALAHAN PELAYANAN**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
	MISI : KEEMPAT			
	PROGRAM : 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2. Penataan struktur Industri 3. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5. Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan berbasis Teknologi 6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, 7. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	**SEKTOR INDUSTRI** 1. Masih rendahnya produkdivitas dan kualitas Industri kecil dan menengah; 2. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 3. Belum tertatanya insdutri secara baik 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah. **SEKTOR PERDAGANGAN** : 1. Masih memadainya perlindungan terhadap konsumen 2. Masih rendanya pengetahuan masyarakat tentang psosedur ekspor dan impor . 3. Belum tertata dengan baik system perdagangan lintas batas; 4. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif; 5. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;	1. Keterbatasan jumlah Dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan; 2. Anggaran Provinsi relative terbatas jumlahnya; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana UPT; 4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif 5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis 6. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 7. Industri kreatif Belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam	1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya dan prasarana kerja yang memadai 3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur 4. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi. 5. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintan Provinsi 6. Tersedianya data/ informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan 7. Tersedianya Standar operasional prosedur kerja.

			pola; 8. Masih lemahnya Daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, 9. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/ bisnis 10. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen	

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga

Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005 - 2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional**,** sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta perubahan lingkungan strategis baik didalam

negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu :

a. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
b. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
c. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
d. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
e. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan
f. Tumbuh dan berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat dari pada industri kecil.

Sejalan dengan implementasi AFTA dan AEC (Asean Economic Community) 2015, masuknya produk-produk impor pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri. Dibutuhkan kebijakan yang sistematik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk komoditi lokal baik pada sisi poduksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain :

a. Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam pembentukan PDB;
b. Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur teknologi industri;
c. Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual dalam kondisi bahan mentah;
d. Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;
e. Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;

f. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk impor dan barang berbahaya;

g. Menggalakkan gerakan "*Cinta Produk Dalam Negeri*"

Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada sektor hulu maupun hilir.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk buah - buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain :

a. Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;
b. Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
c. Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;
d. Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.

Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sector ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transfortasi, tenaga kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal

tersebut, khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti daerah.

Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan Klaster - Klaster Industri Prioritas Nasional ; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah, mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi. Pada tahun 2010 - 2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam) kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Pengembangan Klaster Industri Prioritas

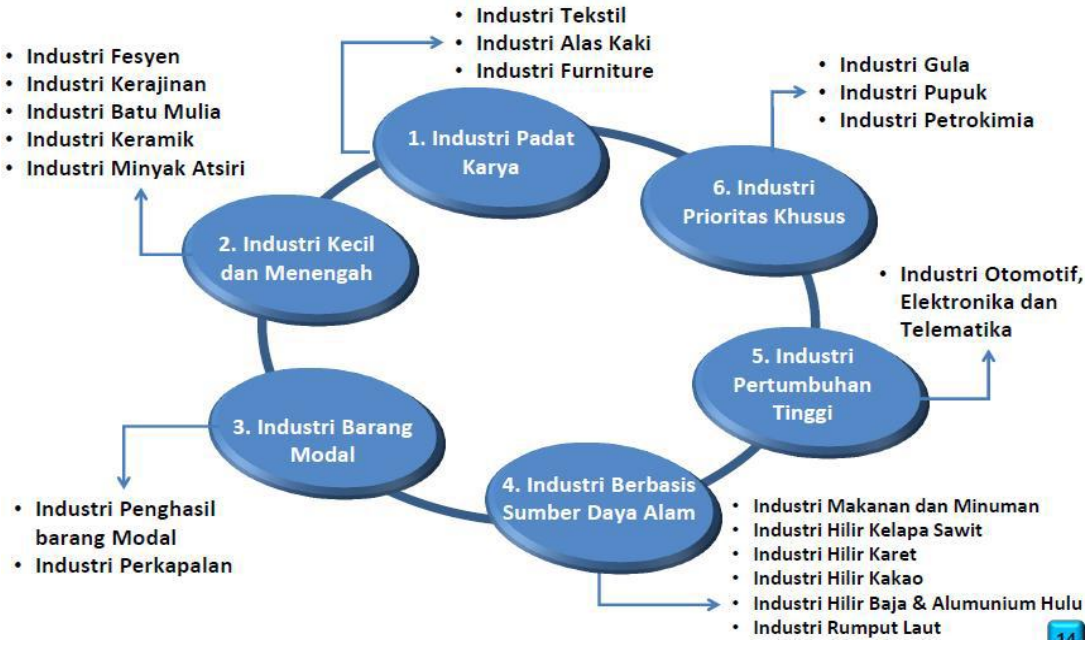

Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan menggunakan empat intrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran swasta dengan skema Public Private Patnership.

Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak trampil, yang perlu direktrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut; c) Industri Telematika.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada

keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

"Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor",

Adapun arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri adalah *"Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik".*

Dalam dokumen Rencara Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2010 - 2014 adalah :

1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi;

Berdasarkan misi tersebut telah dirumuskan sasaran strategis untuk jangka waktu 2010 - 2014 adalah Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekslusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor). Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain dapat dilihat jelas pada gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera dibawah ini :

Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Sumatera

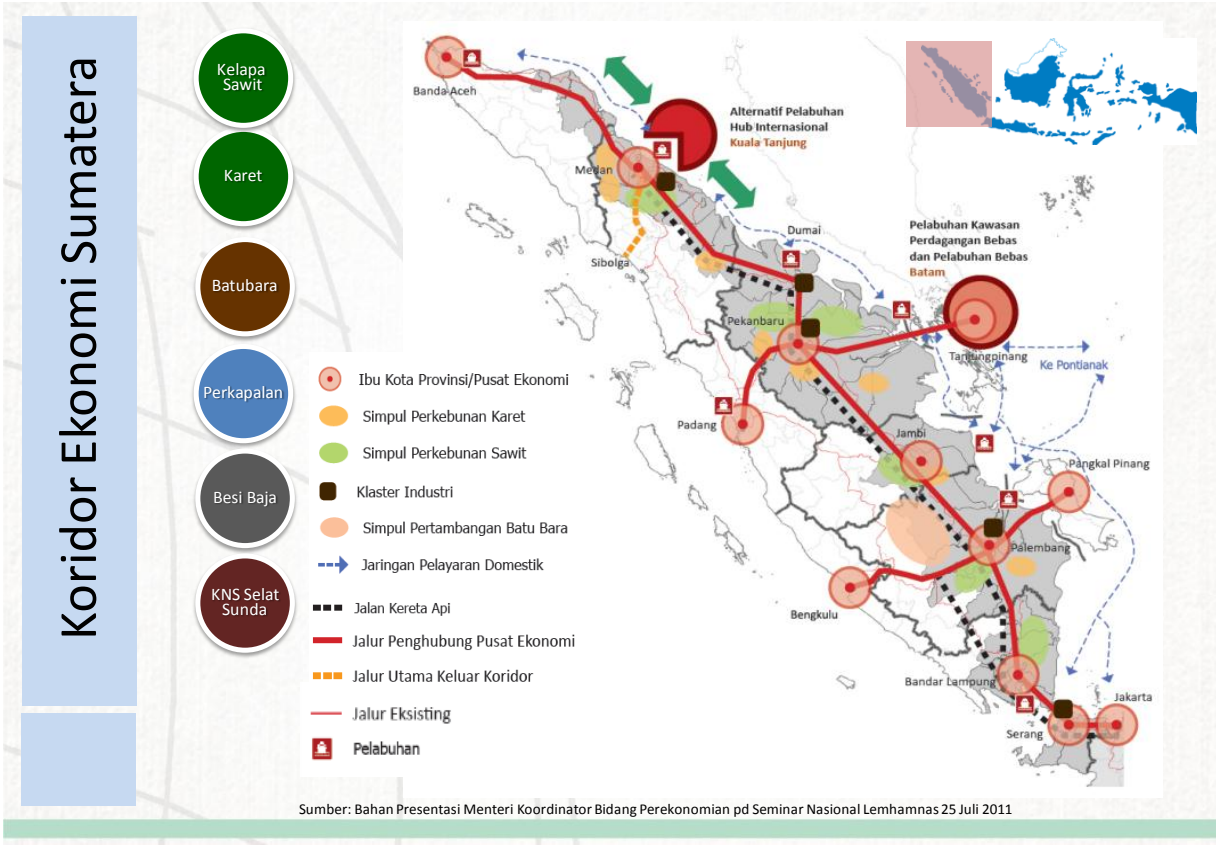

Sumber: Bahan Presentasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pd Seminar Nasional Lemhamnas 25 Juli 2011

9

Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan" konektivitas" nasional yang diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	**BIDANG INDUSTRI :** 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.; 3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industry; 4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;. 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industry; 7. Menguatnya struktur industry.	**BIDANG INDUSTRI :** 1. Masih rendahnya produkdivitas dan kualitas Industri kecil dan menengah; 2. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 3. Belum tertatanya insdutri secara baik 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah .	1. Kebijakan teknis Bidang perindustriand an kerjasama industri belum optimal; 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiat an belum sesuai dengan yang dibutuhkan, 3. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya 4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal 5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing 6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan	1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Meningkatnya Anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi 4. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan.

			belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan. 8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/ Kota; 9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, 10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;	
	BIDANG PERDANGAN : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. 2. Meningkatnya pengmanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik pasar	**BIDANG PERDAGANGAN :** 1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; 2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif; 3. Kurang memadainya jumlah maupun	1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan 2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya 3. Keterbatasan sarana dan	1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur 3. Meningkatnya anggaran belanja dan

	domestik maupun internasional. 3. Meningkatnya diversivikasi pasar dan produk Ekspor. 4. Menurunanya hambatan akses pasar. 5. Meningkaynya Promosi dan Citra Produk Ekspor. 6. Opimalnya kinerja kelembagaan ekspor. 7. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan. 8. Menimgkatnya kuantitas dan kualitas sarana distribusi dan logistik nasional. 9. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. 10. Meningkatnya pemanfataan pasar berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang. 11. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah. 12. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok. 13. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan. 14. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang dan jasa. 15. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berudaha di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. 16. Meningkatnya	kualitas SDM bidang perdagangan; 4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; 6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sector hulu dan	prasarana 4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis 5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. 6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang ; 7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/ bisnis; .	anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi 4. Tersedianya regulasi industry dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan

	dukungan kinerja pelayanan publik. 17. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme sumberdaya manusia sektor perdagangan 18. Meningkatnya birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bersih. 19. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal.			

3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2009 - 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2029 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Riau yang efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran :

a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.
b. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis.
c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi.
d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :

a. Mengembangkan kawasan industri yang akan direncanakan
b. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika.
c. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
d. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu, *clean development mechanism*, serta produksi bersih;

e. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
b. Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
c. Memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
d. Industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.

Dalam hal rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau untuk mengoptimalkannya, ditetapkan beberapa rencana pengembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kota Dumai
2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Rencana Pembangunan kawasan Industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis
4. Rencanan Pembangunan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru.
5. Kawasan Industri Tg. Buton di Kabuapaten Siak.

Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Pada Renstra Periode 2014 - 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan berfokus pada pengembangan kawasan industri hilir kelapa sawit di pelintung Kota Dumai, di Kuala enok Kabupaten Indragiri Hilir,

Kawasan Industri Tg. Buton serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Riau. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Riau diwujudkan melalui pembagian Wilayah Pengembangan (WP). Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan dilakukan dengan mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan berdasarkan KLHS

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan	▪ Alih fungsi lahan (kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya ▪ Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan Keseimbangan pembangunan yang	Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	▪ Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah inndustry	Mendorong pelaksanaan Green Industri	
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	▪ Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh	Mendorong industry menjaga kelestarian lingkungan	
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	▪ Terjadinya over fishing serta eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang	Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya	
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas daptasi terhadap perubahan iklim	▪ Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian,		

		pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup unutk mengadapi resiko perubahan iklim		

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Riau bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2014 - 2019, sebagai berikut :

a. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
b. Peningkatan Daya Beli.
c. Pengembangan Komoditi Unggulan,
d. Moderenisasi industri ALSINTAN,
e. Peningkatan Industri Potensi Lokal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. V i s i dan Misi

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 adalah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019. Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu terkait dengan Misi Keempat Menurunkan kemiskinan adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN NIAGA YANG TANGGUH,MANDIRI DAN DINAMIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA MAMPU BERSAING DI PASAR DOMESTIK DAN GLOBAL".

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Misi pertama, ***Meningkatkan daya saing industri Provinsi Riau***. Hal ini untuk menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional maupun global
- Misi kedua, ***Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri***. Hal ini untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Provinsi Riau ke luar negeri.
- Misi ketiga, ***Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran kemetrologian.*** Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Provinsi Riau.

- Misi keempat, ***Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.*** Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dilakukan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas tersebut diatas, untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi dioprasionalkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama : ***Meningkatkan daya saing industri Provinsi Riau***.

Memiliki kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang sebuah lembaga akan dapat tumbuh dan berkembang serta dengan kemampuan yang tinggi sebuah industri dan perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Misi pertama, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- *Tujuan* : Meningkatkan produksi dan produktivitas produk-produk industri di wilayah Provinsi Riau.
- *Sasaran*, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
  1. Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan jumlah produk IKM yang mampu bersaing
  2. Tertatanya struktur industri di Provinsi Riau
  3. Meningkatnya kemampuan dalam tekonologi produksi
  4. Meningkatnya wira usaha baru

Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

Melaksanakan misi perdagangan luar negeri memerlukan kemampuan bersaing yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau mendorong dan memfasilitasi aktivitas perdagangan agar dapat tumbuh dan berkembang agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Misi kedua, Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- *Tujuan* : Mengembangkan promosi dan jejaring kerjasama industri dan perdagangan Provinsi Riau di pasar global.
- *Sasaran*, sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
  1. Meningkatnya ekspor Provinsi Riau.
  2. Meningkatnya jumlah produk-produk ekspor.
  3. Meningkatnya Kerjasama Internasional.
  4. Menurunnya/terjaganya jumlah nilai produk impor.

Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran Kemetrologian.

Kelancaran distribusi barang di pasar merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas agar jumlah transaksi meningkat, seperti : lelang komoditi agro, efektifitas dan efiensi distribusi produk-produk IKM di dalam negeri dan diluar negeri memiliki kelancaran dan keamanan yang tinggi. Perlindungan dan pengembangan pasar tradisional meningkatnya peranan kemetrologian untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam perdagangan dalam negeri.

Sesuai dengan Misi ketiga Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

- *Tujuan* :
  1. Meningkatnya distribusi, promosi, pengamanan dan kerjasama industri dan perdagangan Provinsi Riau di pasar nasional.

2. Meningkatnya perlindungan konsumen dan keamanan pasar dalam negeri dalam distribusi produk.

❖ *Sasaran,* sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya efektifitas dan efiensi kelancaran distribusi produk-produk di dalam negeri. Hal ini dapat diukur dari laju inflasi.
2. Meningkatnya keamanan dan tertib ukur produk-produk IKM dalam perdagangan luar dan dalam negeri.
3. Meningkatnya jumlah transaksi lelang komoditi Provinsi Riau. Meningkatnya peranan kemetrologian untuk meningkatkan kualitas produk dalam perdagangan dalam negeri.
4. Meningkatnya dan berkembangnya pasar tradisional.

Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi disertai dengan tersedianya sarana prasarana kerja yang baik dapat mewujudkan sebuah perencanaan yang tepat dan pelaksanaan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan kinerja lembaga yang tinggi untuk masa kini dan masa mendatang dan akhirnya tujuan serta sasaran Dinas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.

Sesuai dengan *Misi keempat* Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai adalah:

❖ *Tujuan* : Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

❖ *Sasaran : S*esuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia.
2. Meningkatknya sarana dan prasarana kerja

4.3. Strategi dan Kebijakan.

Strategi dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 2014-2019, adalah langkah- langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah upaya yang perlu dilakukan adalah:

Misi pertama* : *Meningkatkan daya saing industri Provinsi

A. Strategi.

1. Meningkatkan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri logam mesin dan elektronika).
2. Meningkatkan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri.
3. Medorong memanfaatkan kapabilitas dan potensi alam Provinsi Riau sebagai bahan baku industri IKM.

B. Kebijakan :

1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri logam mesin dan elektronika).
2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri.

Misi kedua* : *Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

A. Strategi.

1. Menumbuhkan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri
2. Meningkatkan kerja sama perdagangan dan promosi luar negeri

B. Kebijakan :

Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang dan pengembangan pasar luar negeri.

Misi ketiga* : *Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan peran kemetrologian.

A. Strategi :

1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

B. Kebijakan:

1. Mendukung pembangunan pusat gelar produk ekonomi unggulan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
2. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar
3. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien
4. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan
5. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen
6. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya
7. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat Logistik berbasis Kewilayahan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi
4. Program Pengembangan Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
9. Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Adapun rincian program, kegiatan serta Target Indikator dan Pendanaan selama 5 (Lima) Tahun ke depan, Tahun 2014 - 2019, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan produksi dan produktivitas produk industri Provinsi Riau	**Meningkatnya produksi dan keterkaitan produktivitas serta antara sektor primer, sekunder, dan tersier dalam sistem yang produktif bernilai tambah dan berdaya saing**	**Jumlah unit Usaha Industri Kecil Menengah**	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Outcome :** Persentase Meningkatnya pertumbuhan IKM	7117 IKM	7%	5.538,40	7%	3.850	7%	4.430	7%	4.910	7%	6.825	35%	16.865,00	Provinsi Riau
			Dengan kegiatan:	**Output :**														
			1. Pembinaan Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang dilatih	-	-	-	-	-	16 IKM	1.500	20 IKM	1.350	25 IKM	1.000	41 IKM	3.850	
			2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah produk hasil olahan IKM	-	-	-	-	-	30 Produk	200	45 Produk	160	60 Produk	450	135 Produk	810	
			3. Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM	Jumlah IKM yang dibantu	-	-	-	-	-	12 IKM	1.000	15 IKM	700	20 IKM	1.500	47 IKM	3.200	
			4. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah produk IKM yang dipasarkan	-	-	-	-	-	40 produk	200	50 Produk	200	60 Produk	400	150 Produk.	800	
			5. Pameran Promosi produk IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	-	-	-	15 IKM	400	15 IKM	600	20 IKM	1.200	25 IKM	1.000	75 IKM	3.200	
			6. Pelatihan CEFE bagi IKM yang sudah di Diagnosa Oleh UPL	Jumlah pelaku IKM yang mengikti pelatihan	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	-	30 org	200	24 org	160	24 org	190	24 org	250	78 Orang	800	Prov. Riau
			7. Partisipasi PFPP Pada Konvensi GKM Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi mengikuti GKM	-	-	-	13 org	100	13 org	100	10 org	140	10 org	350	46 Orang	690	Luar Prov
			8. Diagnosis KUB di 12 Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang didiagnosa KMNnya	-	-	-	6 KUB	100	12 KUB	100	12 KUB	100	12 KUB	125	42 KUB	425	Prov. Riau
			9. Pendampingan Langsung PFPP Bagi IKM	Jumlah Unit Usaha yang dibina langsung PFPP	-	-	-	16 Unit Usaha	150	24 Unit Usaha	120	24 Unit Usaha	140	24 Unit Usaha	200	88 Unit Usaha	610	Prov. Riau
			10. Pemberian Penghargaan Adikriya	Jumlah Kab/kota yang diberi penghargaa	-	-	-	18 Jenis Usaha dan 6 Eksportir	200	18 Jenis Usaha dan 6 Eksportir	450	18 Jenis Usaha dan 6 Eksportir	450	18 Jenis Usaha dan 6 Eksportir	600	72 Jenis Usaha dan 24 Eksportir	1.250,0	Prov. Riau
			11. Pembinaan Sentra Pengerajin IKM	Jumlah sentra Pengrajin IKM yang dibina	-	-	-	-	-	-	-		100	3 sentra	450	6 Sentra	550	Prov. Riau
			12. Penerapan Standar Mutu Produk IKM	Jumlah produk IKM yang dilakukan Standar Mutu	-	-	-	-	-	-	-	10 Produk	180	20 IKM	500	30 IKM	680	Prov. Riau
Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	**Revitalisasi Industri melalui peluang hilirisasi komoditi utama daerah dan penguatan struktur industri serta kawasan industri**	**Jumlah Kawasan Industri yang difasilitasi**	**Program Penataan Struktur Industri**	**Outcome:** Jumlah Kawasan dan Industri Unggulan, Prioritas yang difasilitasi	1 Kawasan -	1 Kawasan -	6.115 -	1 Kawasan -	7.250 -	- -	- -	1 Kawasan 3 UU	1.700	1 Kawasan 3 UU	1.900	5 Kawasan 6 UU	4.500	Prov. Riau
			Dengan kegiatan :	**Output :**														
			1. Kajian pengembangan Kawasan Industri	Jumlah Perencanaan Kawasan Industri yang ada di Prov. Riau	2 dokumen	1 Dokumen	500	2 Dokumen	400	-	-	1 Dokumen	400	1 Dokumen	500	7 Dokumen	1.800	Prov. Riau
			2. Promosi pengembangan potensi kawasan industri agro Prov. Riau	Jumah kawasan industri agro yang dipromosikan di Provinsi Riau	0 kawasan	-	-	-	-	-	-	4 kawasan	400	4 kawasan	400	8 kawasan	800	Prov. Riau
			3. Forum dukungan pengembangan kawasan industri agro di Provinsi Riau	Jumlahkawasan pengembangan potensi kawasan di Provinsi Riau	0 kawasan	-	-	-	-	-	-	4 kawasan	300	4 kawasan	350	8 kawasan	650	Prov. Riau
			4. Penyusunan Database dalam rangka pengembangan kawasan industri	Jumlah dokumen data potensi agro dalam kawasan industri di Provinsi Riau	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	600	1 dokumen	650	2 kawasan	1.250	Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kemampuan teknologi produksi industri Basis Manufaktur	**Terwujudnya pengembangan dan inovasi teknologi produksi Industri Basis Manufaktur**	**Jumlah unit usaha yang ditingkatkan kemampuan teknologi industrinya**	**Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	**Outcome :** Meningkatnya Unit Usaha kemampuan teknologi tepat guna alsintan	4 Unit Usaha	2 Unit Usaha	945	3 Unit Usaha	500	4 Unit Usaha	1.950	4 Unit Usaha	4.150	5 Unit Usaha	5.400	18 Unit Usaha	30.166	Prov. Riau
			Dengan Kegiatan : 1. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	**Output :** Jumlah gelar teknologi tepat guna nasional yang diikuti.	4 uu	1 uu	250	2 kali	250	2 uu	250	3 uu	450	3 uuu	450	13 uu	1.650	Luar Prov
			2. Pelatihan Industri Komponen Pabrik (Pengelasan&Bubut)	Jumlah peserta dari IKM yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-		15 Org	250	-	-	-	-	15 org	250	Prov. Riau
			3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)	Jumlah peserta dari IKM yang mengikuti sosialisasi P3DN	35 org	35 Org	150	25 org	250	40 org	250	30 org	400	30 org	400	195 org	1.450	Prov. Riau
			4. Pelatihan Teknologi Pelapisan logam bagi Industri logam yang ramah lingkungan	Jumlah peserta yang dilatih teknologi pelapisan logam yang ramah lingkungan	0 org	-	-	-	-	20 org	250	20 org	300	20 org	350	60 org	1.150	Prov. Riau
			5. Pelatihan Peningkatan SDM Pandai Besi 12 Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih peningkattan SDM pandai Besi.	35 org	20 org	200	-	-	24 org	250	20 org	300	20 org	400	119 org	1.400	Prov. Riau
			6. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Industri Agro dan Industri berbasis Unggulan yang dilatih	-	-	-	-	-	25 Orang	500	-	-	-	-	25 Orang	303,82	
			7. Penyediaan mesin peralatan pembuatan kerajinan dari Batok Kelapa	Jumlah Kelompok yang diberi bantuan mesin peralatan	-	-	-	-	-	4 Kelompok	200	-	-	-	-	4 Kelompok	**198,50**	
			8. Promosi dan Kerjasama Pengembangan Industri Berbasis Manufaktur (promosi)	Jumlah IKM Terfasilitasinya promosi inovasi produk-produk industri berbasis manufaktur	0 uu	-	-	-	-	-	-	5 UU	400	5 UU	400	10 UU	800	
			9. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri	Jumlah Unit Usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan sarana dan prsarana teknologi	0 unit	-	-	-	-	-	-	4 unit	600	4 unit	700	8 unit	1.300	
			10. Bimbingan Teknis dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Basis manufaktur	Jumlah peserta yang di Bimtek Peningkatan Daya saing Industri Basis Manufaktur	0 org	-	-	-	-	-	-	20 org	550	20 org	600	40 org	1.150	
			11. Pengembangan desain, rekayasa dan fabrikasi ndustri perbengkelan kendaraan bermotor	Jumlah peserta yang dilatih pengembangan desain, rekayasa, fabrikasi indusri perbengkelan	0 org	-	-	-	-	-	-	20 org	550	20 org	600	40 org	1.150	
			12. Pengkajian Teknologi tentang Pemanfaatan Biomassa industri sawit	Jumlah dokumen Study Kelayakan Pengembangan Pemanfaatan Bio Massa Industri sawit	0 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	600	-	-	1 dokumen	600	
			11. Penumbuhan dan Pengembangan pemanfaatan pemanfaatan Biomassa industri sawit	Pembinaan calon pengguna hasil study kelayakan yang meliputi pelatihan teknis teknologis, manajemen, entrepreneurship dll.	0 uu	-	-	-	-	-	-	-	-	5 uu	1.500	5 uu	1.500	
Meningkatnya struktur Industri Agro dan Industri Unggulan	**Terwujudnya Industri Agro dan Industri Unggulan yang berdaya saing tinggi**	**Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja yang diserap disektor industri agro**	**Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi**	**Outcome:** Persentase meningkatnya jumlah, jenis dan kualitas diversifikasi produk industri unggulan agro dan kimia	-	-	-	-	-	35%	2.980,81	34%	2.910	34%	2.920	102%	8.632	Prov. Riau
			Dengan Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Industri Pengolahan Diversifikasi Produk Industri Agro, Kimia dan Manufaktur	**Output:** Tersedianya profil industri agro, kimia dan manufaktur dalam rangka mendukung investasi	-	-	-	-	-	1 dokumen	500					1 dokumen	500,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	meningkatnya kualitas produk dan kemampuan pelaku suaaha dalam pengolahan pisang	-	-	-	-	-	30 orang	530,81					30 orang	351,96	
			3. Perluasan penerapan SNI untuk Mendorong daya saing Industri Manufaktur	Jumlah pelaku usaha industri manufaktur pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit yang menerapkan SNI wajib	-	-	-	-	-	12 Kab/kota	300	12 Kab/kota	350	-	-	12 Kab/kota	650,00	
			4. Sosialisasi Diversifikasi Produk Industri Agro dan Kimia	Jumlah pelaksanaan RIPIP Provinsi Riau dan komoditi unggulan provinsi riau	-	-	-	-	-	12 kab/kota	200	-	-	-	-	12 kab/kota	200	
			5. Pameran Divesifikasi produk turunan Industri Agro dan Kimia	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran diversifikasi produk turunan	-	-	-	-	-	6 pelaku usaha	500	6 pelaku usaha	610	6 pelaku usaha	720	18 pelaku usaha	1.830,00	
			6. Pengujian produk Agro dan Kimia di Provinsi Riau	Jumlah jenis produk industri produk agro kimia yang diuji untuk memenuhi standar SNI	30 jenis produk	-	-	-	-	30 jenis produk	200	30 jenis produk	600	30 jenis produk	700	90 jenis produk	1.500,00	
			7. Pengembangan kapasitas pelaku industri Agro dan kimia	Jumlah pelaku IKM agro yang meningkat kapasitas	-	-	-	-	-	25 orang 12 kab/kota	350	-	-	-	-	25 orang 12 kab/kota	350,00	
			8. Bimtek/magang pengolahan serat sabut karet	Jumlah pelaku industri agro dan kimia yang diikutkan magang pengolahan serat sabut karet	-	-	-	-	-	-	-	12 orang 6 kab/kota	450	13 orang 6 kab/kota	500	25 orang 12 kab/kota	950	
			9. Bimtek/magang pengolahan sabun transparan dan sabun cair dari minyak kelapa dan dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit	Jumlah pelaku industri yang diikutkan magang	-	-	-	-	-	-	-	10 orang 6 kab/kota	450	10 orang 6 kab/kota	500	20 orang 12 kab/kota	950	
			10. Bimtek/magang pengolahan Desicated Coconut bagi petani kelapa di Provinsi Riau	Jumlah pelaku industri yang diikutkan magang	-	-	-	-	-	-	-	12 orang 6 kab/kota	450	10 orang 5 kab/kota	500	22 orang 11 kab/kota	950	
			11. Pengembangan kapasitas SDM Industri agro dan industri berbasis manufaktur	Jumlah pelaku Industri yang Meningkatnya kemampuan SDM	-	-	-	-	-	10 orang	400	-	-	-	-	10 orang	400,00	
Meningkatkan SDM aparatur pembina IKM dan pelaku IKM yang terampil	**Terwujudnya pelaku IKM yang terampil**	**Memberikan Pelatihan kepada dan pelaku IKM**	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**Outcome :** Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha/IKM		15,52%	4.660	5,65%	3.500	24,08%	6.906,09	26,48%	7.758	25,20%	8.000	97%	36.744,30	
			Dengan Kegiatan : 1. Pembinaan Kemampuan Teknolog Industri	**Output :** Jumlah IKM yang terlatih	346 Org	232 org	2.760	72 org	9.602,67	284 org	2.806,09	312 org	2.621	343 org	2.750	1.741 Org	20.539,76	
			2. Peningkatan kapasitas dan pengembangan UPT. PPIP	Pelayan Pablik	5 Thn	12 bln	500	12 bln	500	12 bln	600	12 bln	800	12 bln	800	10 Thn	3.200	
			3. Revitalisasi sarana dan prasarana workshop IKM	Jumlah mesin peralatan	26 Unit	-	-	-	-	-	-	4 Pkt	2.000	3 Pkt	1.500	7 Pkt	3.500	
			4. Bantuan Mesin/ peralatan bagi IKM	Jumlah bantuan mesin/ peralatan	12 unit	107	717,55	-	-	148	3.500	162 Unit	1.500	180 Unit	2.000	609 Unit	7.717,55	
			5. Peningkatan Kerjasama UPT. PPI dengan Pihak Swasta	Jumlah mou dengan Pihak Swasta	-	-	-	-	-	-	-	3 Mou	250	4 Mou	300	7 Mou	550	
			6. Peningkatan SDM Aparatur Pembina IKM	Jumlah Aparatur yang Terlatih	-	-	-	-	-	-	-	72 Org	586,99	72 Org	650	144 Org	1.236,99	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terciptanya Tertib Ukur disegala Bidang dan Perlindungan Konsumen	**Semua jenis alat UUTP dan barang barang yang beredar**	**Jumlah UTTP, BDKT dan Toko**	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Outcome:** Terciptanya tertib ukur di segala bidang dan perlindungan konsumen (alat UUTP dan jumlah toko) Perlindungan Konsumen		8. 250 UTTP 200 Toko	3.946	8. 350 UTTP 250 Toko	1.450	9. 300 UTTP 250 Toko	4.250	300 Toko	4.300	350 Toko	4.500	25.900 UTTP 1. 400 Toko	18.146	Provinsi Riau Riau
			Dengan kegiatan: 1. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	**Output :** Jumlah pengawasan barang beredar per tahun	200 Toko	200 Toko	1823	250 Toko	250	250 Toko	350	500 Toko	750	500 Toko	750	1.900 Toko	3.923	
			2. Peningkatan Pengawasan Kemeterologian	Jumlah Pengawasan penggunaan alat UTTP dan BDKT per tahun	5,000 UTTP	5,000 UTTP	350	5,100 UTTP	200	6,000 UTTP	450	–	–	–	–	16100 UTTP	1.000	
			3. Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pembentukan tertib ukur	–	–	–	–	–	2 pasar	300	4 pasar	600	6 pasar	800	12 pasar	1.700	
			4. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pelaku Usaha dan Pedagang	Jumlah pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan terhadap perlindungan konsumen	–	–	–	–	–	30 Orang	300	70 Orang	500	100 org	750	200 Orang	1.550	
			5. Pendataan Alat UTTP se Provinsi Riau	Tersedianya Pendataan Alat UTTP se Provinsi Riau	3.114 unit	3.250 unit	400	3.250 unit	200	3.300 unit	600	–	–	–	–	3.400 unit	1.200	
			6. Rapat Koordinasi Pengawasan Se Provinsi Riau	Terlaksanaya Rapat Koor dinasi Bidang Perdagangan bagi aparatur Se - Provinsi riau	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	150	–	–	–	–	–	–	–	–	12 Kab/Kota	150	
			7. Penyelesaian Permasalahan - permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	–	–	–	–	–	50 org	250	100 Pengaduan	550	100 Pengaduan	600	250 org	1.400	
			8. Tindak lanjut Pengawasan dan perlindungan konsumen	Jumlah masalah yang ditindak lanjuti	–	–	–	20 kasus	300	20 kasus	200	20 kasus	350	20 kasus	400	80 kasus	950	
			9. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Tersedianya dukungan rencana dan program/kegiatan pengawasan dan perlindungan konsumen	–	–	–	–	–	12 Kab/Kota	300	–	–	–	–	12 Kab/Kota	300	
			10. Pengawasan Tim Terpadu	Jumlah Jenis barang yang diawasi oleh Tim Terpadu	–	–	–	–	–	–	–	5 Komoditi	500	5 Komoditi	600	12 kab/kota	1.100	
			11. Kajian Barang Beredar dalam menghadapi MEA	Jumlah dokumen kajian barang beredar dalam menghadapi MEA	–	–	–	–	–	–	–	1 dokumen	600	–	–	1 dokumen	600	
			12. Supervisi Kebijakan Tertib Niaga	Jumlah Pelaku Usaha dilakukan Pembinaan Tertib Niaga	–	–	–	–	–	–	–	100 PU	250	150 PU	300	200 PU	550	
			13. Pembinaan BPSK	Jumlah Sosialiasi	–	–	–	–	–	–	–	1 Kali	200	1 Kali	300	2 Kali	500	
Terwujudnya Pelayanan UPT. Kemetrologian	**Kemampuan Pelayanan Kemetrologian**	**Jumlah alat UTTP yang di uji**	14. Operasional dan pengembangan UPT Kemetrologian serta Perlengkapannya	Jumlah peneraan UTTP pertahun	23.103	23.403 UTTP	1.223	23.703 UTTP	500	24.003 UTTP	1.500	–	–	–	–	94. 212 UTTP	3.223	
Meningkatnya Ekspor	**Para Ekspotir**	**Nilai Ekspor Provinsi Riau**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Outcome :** Meningkatnya Nilai Ekspor Prov. Riau per tahun	17.557.157.090 US $	#REF! US $	2.650	18.087.822.168 US $	8.832	18.359.139.495 US $	8.971	18.634.526.588 US $	11.075	18.914.044.487 US $	29.202	#REF! US $	44.234	
			Dengan kegiatan: 1. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Luar Negeri	**Output:** 1. Jumlah Eksportir 2. Jumlah Negara Tujuan Ekspor	6 Eksportir 4 Wilayah	8 Eksportir 3 Expo	500	17 Eksportir 3 Expo	6.732	21 Eksportir 6 Expo	3.000	23 Eksportir 6 Expo	3.500	26 Eksportir 6 Expo	13.732	95 Eksportir 19 Expo	21.464	
			2. Pendataan importir Se - Propinsi Riau	Jumlah penerbitan API	138 API	-	-	60 API	100	75 API	200	80 API	300	100 API	600	453 API	1.200	
			3. Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang Ekspor	Jenis Pelatihan dan jumlah Eksportir / Importir	4 Pelatihan 190 UKM	4 Pelatihan 190 UKM	450	3 Pelatihan 150 UKM	350	–	–	4 Pelatihan 250 UKM	1.500	4 Pelatihan 300 UKM	1.700	19 Pelatihan 1.280 UKM	4.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur/ Dokumen ekspor dan Impor	jumlah Eksportir / Importir	3 Kab/Kota 150 pelaku usaha			3 Kab/Kota 150 pelaku usaha	250	11 Kab/Kota 550 pelaku usaha	800	11 Kab/Kota 550 pelaku usaha	800	11 Kab/Kota 550 pelaku usaha	1850	11 Kab/Kota 1.950 Pelaku usaha	3.700	
			5. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Impor Se - Provinsi Riau	Jumlah Importir se Prov. Riau yang dimonitoring	–	–	–	–	–	40 Importir	165	80 Importir	400	100 Importir	565	220 Importir	1.065	
			6. Pelatihan Diversifikasi Produk Ekspor Provinsi Riau	Jumlah IKM yang dilatih	–	–	–	–	–	30 UKM	900	40 UKM	1.000	50 UKM	1.900	120 UKM	3100	
			7. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan (Identifikasi Data Impor Kab/Kota)	Terlaksananya monitoring impor	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	–	–	–	–	–	–	–	–	11 Kab/Kota	100	
			8. Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah (Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor)	Jumlah Pelatihan Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor						5 Pelatihan	1.326							
			9. Penyusunan Kajian Pengembangan Pelabuhan Dumai sebagai Pintu masuk Impor Produk Holtikultura	Terlaksananya Kajian Pengembangan pelabuhan Dumai sebagai pintu masuk Impor Produk Holtikultura	1 kegiatan			1 kegiatan	300	–	–	–	–	–	–	1 dokumen	300	
			10. Dukungan Pencitraan Produk Ekspor Daerah	Jumlah jenis produk yang dicitrakan	–	–	–	–	–	–	–	4 Jenis	600	4 Jenis	600	8 Jenis	1.200	
Terwudnya Pelayanan UPT. PSMB yang Profesional dan Handal	**Kompetensi UPT. PSMB**	**Sertifikat Hasil Uji, Kalibrasi dan SNI**	**Dengan Kegiatan :** 11. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT PSMB	Meningkatnya pelayanan UPT PSMB (jumlah lapor-an uji, kalibrasi dan SPPT SNI)	12 bulan	12 bln	550	12 bln	500	12 bln	500	12 bln	510	60 Bulan	2.060	5 Tahun	2,525	
			12. Pembelian bahan kimia bahan habis pakai dan sarana laboratorium UPT PSMB	Terpenuhinya kebutuhan operasional lab. UPT PSMB	5 lab	5 lab	550	5 lab	300	5 lab	600	5 lab	600	5 lab	2.050	5 lab	4.100	
			13. Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam rangka Akreditasi UPT PSMB	Peningkatan jumlah peralatan uji / kalibrasi	3 LPK	3 LPK	250	3 LPK	300	3 LPK	330	3 LPK	365	3 LPK	1.245	3 LPK	1,645	
			14. Sosialisasi Penerapan SNI	Jumlah Sosialisasi / Promosi	7 kab/ kota	7 kab/ kota	250	–	–	7 kab/ kota	300	8 kab/ kota	350	8 kab/ kota	900	8 kab/ kota	1,275	
			15. Peningkatan Kapasitas lab Penguji Mutu Ba rang Ekspor dan Impor	Jumlah LPK yang meningkat kapasitasnya	2 LPK	2 LPK	–	–	–	2 LPK	850	2 LPK	900	2 LPK	1.750	2 LPK	3.500	
			16. Monitoring Penerapan Standar	Jumlah pelaku usaha termonitoring	–	–	–	–	–	–	–	24 Pelaku Usaha	250	24 Pelaku Usaha	250	48 Pelaku Usaha	500	
Mengembangkan promosi dan jejaring kerjasama industri dan perdagangan Provinsi Riau di pasar global	**MOU Kerjasama Ekonomi Regional**	**Melakukan Pertemuan Bilateral**	**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**	**Outcome :** Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Internasional	2 negara	2 negara	950	2 negara	1.000	2 negara	1.392,68	2 negara	1.799,42	2 negara	2.067,19	2 negara	7.209,29	
			Dengan Kegiatan : 1. Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau-Kepulauan Riau/Peringkat Negeri Johor-Melaka	**Output :** Dokumen Kerjasama Internasional	3 Dokumen	3 Dok	950	2 Dok	1.000	3 Dok	892,68	3 Dok	999,42	3 Dok	1.217,19	18 Dok	5.059,29	
			2. Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	Terlaksananya koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan **Internasional**	–	–	–	–	–	1 kegiatan	300	1 kegiatan	350	1 kegiatan	400	1 kegiatan	1.050,00	
			3. Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Tersedianya program software pengelolaan data ekspor dan Impor	–	–	–	–	–	1 Program	200	1 Program	300	1 Program	300	1 Program	800	
			4. Monitoring Perdagangan Lintas Batas	Terlaksananya Monitoring Perdagangan Lintas Batas	–	–	–	–	–	–	–	11 exit/ entry point	150	11 exit/ entry point	150	22 exit/ entry point	300	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengembangkan Distribusi Promosi, Pengamanan dan Kerjasama Industri dan Perdagangan Provinsi Riau di	**Meningkatnya Distribusi, Promosi dan kerjasama Perdagangan di Pasar Nasional**	**Jumlah Sarana Perdagangan**	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dengan Kegiatan :**	**Outcome :** Stabilitas Harga Bahan Pokok	6,83%		12.643		80.800	6,34%	6.250	5,5%	6.250	6,25%	6.250		18.350	
				Output:														
			1. Perencanaan Pembangunan/ Revitalisasi PasarTradisional	Jumlah Pasar yang di revitalisasi	3 Unit	–	–	–	–	6 Pasar	3.000	10 Pasar	3.000	10 Pasar	3.000	29 Pasar	9.000	
			2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah Provinsi Riau	Jumlah Transaksi Lelang	5 Milyar	–	–	–	–	250 Juta	300	250 Juta	300	250 Juta	300	750 Juta	900,00	
			3. Pengendalian dan Evaluasi stabilitasi harga Bapokmas, barang Strategis dan Bersubsidi	Stabilitas harga dapat dikendalikan	12 Kab/Kota	–	–	–	–	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	750,00	
			4. Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Lokasi/Prov	2 Kali	300	–	–	4 Lokasi	500	5 Kali	500	5 Kali	500	15 Kali	1.500	
			5. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang)	Jumlah UKM yang ikut pada Misi Dagang	4 Lokasi/Prov	3 Kali/Prov	250	4 Kali/Prov	450	30 UKM	500	4 Kali/Prov	500	4 Kali/Prov	500	19 Kali / Prov	2.200	
			6. Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali/2Media	200	3 Kali/Media	200	3 Kali/Media	200	9 Kali/Media	600,00	
			7. Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	1 Kali	6 Kab/Kota	750	-	-	-	200	3 Kali	200	3 Kali	200	6 Kali	400	
			8. Pengelolaan Data Fasilitasi Perdagangan (Pasar dan Gudang)	Jumlah Data Pasar dan Gudang yang terfasilitasi	12 Kab/Kota	-	-	-	-	-	150	12 Kab/Kota	150	12 Kab/Kota	150	12 Kab/Kota	300	
			9. Bantuan Usaha Perdagangan dan Pengembangan UKM / PKL	Jumlah UKM / PKL yang terfasilitasi	20 UKM	-	-	-	-	30 UKM/PKL	400	30 UKM/PKL	400	30 UKM/PKL	400	110 UKM/PKL	1.200	
			10. Kajian Penyusunan Data Kebutuhan dan Sumber Pemenuhan BAPOKMAS di Provinsi Riau	Tersedia data kebutuhan pokok masyarakat	-	-	-	1 Dok	200	-	- -	- -	-	-	-	1 Dok	-	
			11. Pemantauan Penggadaan, penyaluran Bersubsidi	Jumlah Lokasi Pemantauan	-	-	-	-	-	-	200	12 Kab/Kota	200	12 Kab/Kota	200	12 Kab/Kota	400	
			12. Monitoring dan Penertiban Minol dan Barang Berbahaya	Jumlah Lokasi Monitoring dan Penertiban	-	-	-	-	-	-	200	12 Kab/Kota	200	12 Kab/Kota	200	12 Kab/Kota	400	
			13. Informasi Harga BAPOKMAS	Jumlah Informasi Harga	1 Media	-	-	-	-	-	350	3 Media	350	3 Media	350	6 Media	700	
Terwujudnya Administrasi Kantor yang prima	**Aparatur Dinas dan UPT**	**Kinerja Pelayanan Aparatur**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Kegiatan :**	**Outcome :** Persentase peningkatan prasarana Kinerja Aparatur	100%	14%	1.875	16%	2.275	25%	3.489,05	22%	3.020	23%	3.134	100%	13.793	Prov. Riau
				Output :														
			1. Peneyediaan Jasa Komunikas sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja operasional Dinas	12 Bulan	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	312,50	12 Bulan	400	12 Bulan	450	60 Bulan	1.663	Prov. Riau
			2. Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhuinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100	12 Bulan	120	12 Bulan	132	12 Bulan	145,2	60 Bulan	597	Prov. Riau
			3. Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	50	12 Bulan	100	12 Bulan	130	12 Bulan	143	12 Bulan	157,3	60 Bulan	580	Prov. Riau
			4. penyediaan barang cetak dan pengandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	75	12 Bulan	100	12 Bulan	150	12 Bulan	165	12 Bulan	181,5	60 Bulan	672	Prov. Riau
			5. Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 Bulan	11 Bulan	250	11 Bulan	250	11 Bulan	250	11 Bulan	250	11 Bulan	250	55 Bulan	1.250	Prov. Riau
			6. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terwujudnya Konsultasi, Koordinasi ,Workhsop, Diklat, Seminar Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	900	12 Bulan	700	12 Bulan	900	12 Bulan	700	12 Bulan	700	60 Bulan	3900	Luar dan Dalam Provinsi

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7. Belanja surat kabar, majalah, sosialiasasi dan publikasi	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	200	12 Bulan	326,75	12 Bulan	200	12 Bulan	200	60 Bulan	926,75	Prov. Riau
			8. Penyediaan jasa Administrasi kantor	Lancar dan Terbantunya Tugas Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	349,80	12 Bulan	250	12 Bulan	250	60 Bulan	1.350	Prov. Riau
			9. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Informasi Tentang Industri dan Perdagangan Provinsi Riau Lebih dikenal dan Terwujudnya Aparatur yang Handal	–	–	–	1 Website	325	1 Website 1 Aplikasi	500	1 Website	300	1 Website	350	1 Website 1 Aplikasi	1.475	Prov. Riau
			10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia dan terkelolanya Bahan bacaan Perpustakaan Disperindag	–	–	–	–	–	50 Buku dan 1 Sistem Perpustakaan	150	200 Buku	150	200 Buku	100	450 Buku 1 Sistem Perpustakaan	400	Prov. Riau
			11. Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Pemberian hibah tepat sasaran sesuai hasil verifikasi	–	–	–	–	–	12 Kab/Kota	300	12 Kab/Kota	330	12 Kab/Kota	350	12 Kab/Kota	980	Prov. Riau
Terwujudnya Aparatur yang Handal dan Profesional	**Aparatur Dinas/UPT**	**Memberikan Pendidikan dan dan Pelatihan bagi Aparatur**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** **Dengan kegiatan:**	**Outcome :** Jumlah Diklat yang diikuti oleh aparatur **Output :**	235 Orang	20 Orang	150	250 Orang	700	95 Diklat dan	1.450	95 Diklat dan	1.620	95 Diklat dan	1.800	285 Diklat	5.720	Prov. Riau
			1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur yang profesional	235 Orang	20 Orang	150	250 Orang	700	16 Diklat	250	16 Diklat	300	16 Diklat	350	48 Diklat	1.750	Prov. Riau
			2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Teknis	Meningkatnya Kinerja Aparatur yang menguasai pekerjaan-pekerjaan teknis	–	–	–	–	–	79 Diklat	1.000	79 Diklat	1.100	79 Diklat	1.200	237 Diklat	3.300	Prov. Riau
			3. In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan	Terwujudnya SDM yang Handal di Bidang Keuangan dan Perlengkapan	–	–	–	–	–	70 Orang	200	75 Orang	220	75 Orang	250	220 Orang	670	Prov. Riau
Terwujudnya Kedisiplinan Aparatur	**Aparatur Dinas/UPT**	**Memberikan Fasilitas Aparatur Dinas/UPT**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur** **Dengan Kegiatan :**	**Outcome :** Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur **Output :**	235 orang	12%	350	25%	750	17%	516	22%	661	25%	750	100%	3.027	Prov. Riau
			1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	235 orang	–	–	250 Orang	300	284 Orang	300	300 Orang	211	300 Orang	250	300 Orang	1.061	Prov. Riau
			2. Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari - hari tertentu	235 orang	235 Orang	350	250 Orang	450	110 Stel	216	300 Orang	200	300 Orang	250	300 Orang	1.466	Prov. Riau
			3. Pengadaan Pakaian Olahraga berserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Olahraga beserta perlengkapan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300 Orang	250	300 Orang	250	Prov. Riau
			4. Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin Absensi	–	–	–	–	–	–	–	4 Unit	250	–	–	4 Unit	250	Prov. Riau
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor serta Kenderaan Operasional Dinas/UPT**	**Melaksanakan pembelian, pemiliharaan dan Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Kenderaan Dinas/UPT**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Dengan Kegiatan :**	**Outcome :** Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas dan UPT **Output :**	90%	2%	1.400	3%	2.500	5%	3.697,70	43%	30.750	47%	33.550	100%	71.597,7	Prov. Riau
			1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		34 Unit	1.000	11 Unit	500	352 Unit	1.697,7	150 Unit, 1 Set dan 1 Sumur	4.000	200 Unit	5.000	682 Unit	12.197,7	Prov. Riau
			2. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeleur Dinas/UPT	124 Unit	–	–	59 Unit	300	46 Unit	350	50 Unit	400	60 Unit	450	215 Unit	1.500	Prov. Riau
			3. Pemeiliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpiliharanya Gedung Kantor Dinas dan UPT		–	–	UPT. PPI Metrologi	500	UPT. PPI dan Gedung Arsip	250	UPT. PPI	350	UPT. PPI	500	UPT. PPI	1.600	Prov. Riau
			4. Pemiliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/operasional	Terpiliharanya Kenderaan Dinas/ Operasional	21 Unit dan 15.000 Ltf	29 Unit dan 20.500 Ltr	250	22 Unit dan 10.500 Ltr	200	26 Unit dan 9.340 Ltr	200	28 Unit dan 15.000 Ltr	250	30 Unit dan 20.000 Ltr	300	135 Unit dan 75.340 Ltr	1.200	Prov. Riau
			5. Pemiliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpiliharanya Peralatan Gedung Kantor	Komputer Jaringan LAN	39 Unit dan 14 Titik LAN	150	43 Unit dan 14 Titik LAN	200	15 Unit dan 14 Titik LAN	200	20 Unit dan 14 Titik LAN	250	25 Unit dan 14 Titik LAN	300	142 Unit dan 70 Titik LAN	1.100	Prov. Riau
			6. Rehabiltasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpiliharanya sarana dan Prasarana yang memadai dan layak serta memberikan rasa aman	3 UPT	–	–	UPT. PPI	500	UPT. PPI	1.000	UPT. PPI	2.500	UPT. PPI	2.000	UPT. PPI	6.000	Prov. Riau
			7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas dan UPT	Tersedianya Gedung kantor Dinas/ UPT yang Respresentatif	–	–	–	1 Dokumen	300	–	–	UPT. PSMB DED Gedung Disperindag	23.000	Kantor Disperindag Prov. Riau	25.000	UPT dan Gedung Disperindag	48.000	Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
						target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Sistem Pelaporan Kinerja yang Akuntable	**Laporan Kinerja Dinas Program Kegiatan bidang Industri dan Perdagangan**	**Tingkat Akurasi data dan ketepatan waktu Pelaporan**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan**	**Outcome :** Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Laporan	11 Dokumen	1.300	13 Dokumen	900	10 Dokumen	1.250	14 Dokumen	1.700	15 Dokumen	1.850	75 Dokumen	7.000	Prov. Riau
			Dengan Kegiatan : 1. Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran	**Output :** Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Disperindag	4 Laporan	4 Laporan	150	4 Laporan	150	4 Laporan	100	4 Laporan	150	4 Laporan	150	24 Laporan	700	Prov. Riau
			2. Pengelolaan Aset Disperindag Prov. Riau	Jumlah Laporan pendataan Disperindag Prov. Riau	4 Laporan	4 Laporan	50	4 Laporan	150	–	–	–	–	–	–	12 Laporan	200	Prov. Riau
			3. Penyusunan Penetapan Kerja (Penja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah	Tertatanya penyusunan Penja, RKT dan Lakip Disperindag Prov. Riau	1 Laporan	1 Laporan	100	3 Laporan	100	3 Laporan	200	3 Laporan	200	3 Laporan	200	14 Laporan	800	Prov. Riau
			4. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Tersusunya Renja Disperindag	1 Dokumen	1 Dokumen	150	2 Dokumen	150	2 Dokumen	200	2 Dokumen	200	2 Dokumen	200	10 Dokumen	900	Prov. Riau
			5. Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan Se - Provinsi Riau	Tersedianya dukunngan rencana program/kegiatan pembangunan sektor Indag Se - Prov. Riau	1 Laporan	12 Kab/Kota	450	12 Kab/Kota	250	12 Kab/Kota	500	12 Kab/Kota	550	12 Kab/Kota	600	12 Kab/Kota	2.350	Prov. Riau
			6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan	Tersedianya hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	400	–	–	1 Laporan	250	1 Laporan	300	1 Laporan	350	5 Laporan	1.300	Prov. Riau
			7. Pengelohan dan Penataan Arsip Disperindag	Jumlah Arsip/ Dokumen Dinas dan UPT	–	–	–	12 Bln	100	—	—	12 Bln	200	12 Bln	250	12 Bln	550	Prov. Riau
			8. Penyusunan SOP Bidang Industri dan Perdagangan	Terwujudnya SOP Disperindag	–	–	–	–	–	–	–	1 Dokumen SOP	100	1 Dokumen SOP	100	2 Dokumen SOP	200	Prov. Riau
			9. Pendataan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah Kab/Kota yang didata	12 Kab/Kota	—	—	—	—	—	—	12 Kab/Kota	1.500	12 Kab/Kota	1.500	12 Kab/Kota	3.000	Prov. Riau
			10. Kajian Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah Kajian Bidang Industri dan Perdagangan	6 Kajian	—	—	—	—	—	—	2 Kajian	1.000	3 Kaijan	1.500	5 Kajian	2.500	Prov. Riau
			11. Penyediaan Informasi dan publikasi media Indag	Tersedianya Informasi dan Terpublikasinya Disperindag	1 Dokumen	—	—	—	—	—	—	1 Dokumen	200	1 Dokumen	200	3 Dokumen	400	Prov. Riau
JUMLAH							**45.000**		**114.407**		**47.533**		**80.903**		**106.248**			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA (SKPD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019 telah dijabarkan berbagai indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau juga telah mengidentifikasikan beberapa indikator kinerja dalam limatahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini diuraikan meliputi dua bidang yaitu bidang industry dan bidang perdagangan yang akan menggambarkan keberhasilan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dalam mengimplementasikan strategi, kebijakan, dan program/kegiatan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka memperkuat struktur perekonomian yang tangguh di Provinsi Riau.

Di bidang perdagangan indikator kinerja yang memberikan peran yang cukup penting adalah persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, nilai ekspor bersih perdagangan. Untuk bidang industri indikator kinerja yang akan diukur adalah persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB dengan migas dan kontribusi sektor inudtri terhadap PDRB tanpa Migas.. Hasil uraian tersebut di atas dapat lebih jelas dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Industri dan Perdagangan dalam RPJMD

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD 2019
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Industri							
1.	Kontribusi Sektor Industri Migas Terhadap PDRB pada harga konstan (%)	2,4	2,39	2,37	2,34	2,31	2,28	2,28
	Kontribusi Sektor Industri Tanpa Migas Terhadap PDRB pada harga konstan (%)	9,28	9,45	9,62	9,80	9,98	10,16	10,16
A.	Perdagangan							
E.	Eskpor Bersih Termasuk Minyak Bumi (US$ Juta)	17,557,157.09	17,557,157,09	18,087,822.17	18,359,139.55	18,634,526.69	18,914,044.58	109,109,846.918
F.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB *(%)*	11.07	11.70	12.36	13.06	13.80	14.58	14.58

BAB VII
P E N U T U P

Dengan telah dirumuskannya Riview Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau Tahun 2014 – 2019 sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Diharapkan dengan selesainya Riview RENSTRA ini akan dapat mengatur arah perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau lima tahun kedepan sehingga dapat meraih keberhasilan dimasa mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2009 - 2013 yang didalamnya telah disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014 - 2019. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC), maka asumsi-asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Provinsi Riau pada tahun 2019. Riview Rencana Strategis ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari pejabat-pejabat eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Riview Rencana Strategis (Renstra) ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Provinsi Riau dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.